

DAFTAR PUSTAKA

- Arniati & Imelda. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan dan Informasi Pendukung terhadap Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Jurnal Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*.
- Amirudin. 2009. Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Studi Kasus Provinsi D.I Yogyakarta TA 2008). *Tesis S2*. Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Halim & Abdullah. 2006. Sinkronisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dengan RKA-SKPD (Studi Kasus Provinsi Gorontalo TA 2009).
- Halim, Abdul & Sukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi.
- _____. 2004. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.